

DAS Serayu Kritis, Pemkab Purbalingga Diminta Lakukan Penghijauan

PURBALINGGA (IM)- Akademisi Universitas Indonesia (UI), Imam Prasodjo menemu Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, Selasa (17/5) di Ruang Tamu Rumah Jabatan Bupati. Pada pertemuan ini, Ia menginformasikan akan adanya potensi bencana dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu jika tidak segera dicegah. "Saya mendapat berita bahwa Sungai Serayu itu mengalami erosi, kinman lumpur yang sangat besar dan bahkan yang tertangkap di waduk Jendral Soedirman (Mrica, Banjarmegara) setiap tahunnya 4 juta meter kubik. Diperkirakan kalau kita tidak melakukan sesuatu waduk Mrica dalam waktu dekat bisa tidak berfungsi," kata Imam dalam rilis yang diterima, Rabu (18/5).

Potensi yang lebih mengerikan jika waduk tersebut jebol akibat tidak kuat menahan tekanan sedimentasi lumpur. Jika itu terjadi maka daerah di bawahnya akan terdampak berbagai bencana, mulai dari luapan banjir, gagal panen ikan, krisis air bersih, ingasi rusak total dan serta dapat meluap ke jalan raya/kereta. "Saya tidak menakutkan. Tapi mari kita bersiap melakukan upaya-upaya pencegahan," katanya.

Salah satu upaya pencegahan yang ia gagas tentu saja penghijauan di sekitar bantaran sungai. Tidak sembarang penghijauan, tapi penghijauan dengan jenis pohon yang bisa bernilai ekonomi untuk pakan ternak. "Kita kepengin punya sentra-sentra pakan ternak, tapi menanamnya di bantaran sungai untuk menahan erosi agar proses sedimentasi di bantaran sungai bisa kita kurangi," katanya.

Hewan ternak yang dikem-

bangkan bisa berupa bibit unggul, misalnya Kambing Kejobong atau kambing perah seperti Kambing Saanen, Etawa, atau Jawa Randu, sehingga hal ini bisa menjadi sumber penghasilan.

"Sehingga potensi musibah ini bisa menggerakkan kita semua menjadi berkah. Semoga ini menjadi titik awal masyarakat bantaran sungai Serayu dari Wonosobo sampai Cilacap menjadi masyarakat sejahtera," tuturnya.

Untuk mengkampanyekan hal ini, pihaknya telah melakukannya kepada kepala daerah di wilayah DAS Serayu. Untuk mensukseskan rencana tersebut, Ia mengajak bupati untuk menggendang para kepala desa sekitar DAS Serayu untuk mendukung. "Mari kita berjejaring untuk melakukan penyelamatan DAS. Harapannya nanti kita bisa mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat, namun yang paling penting adalah jejaring bersama masyarakat," katanya.

Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menanggapi positif ide tersebut. Ia meminta kepada OPD terkait untuk menggerakkan masyarakat. "Jadi ini kaitannya dengan penanaman, bagaimana masyarakat mau menanam tapi mereka harus ada pemberdayaan peternakan," katanya.

Terkait dengan pengolahan pakan ternak ini, menurutnya perlu adanya unit usaha tersendiri, sehingga peternak tidak direpotkan mengambil pakan dari hasil penghijauan tadi. Bupati berharap Purbalingga bisa mendapatkan bantuan alat pengolahan pakan ternak sebagai pilot project pemerintah bank pakan. ● pra



PERESMIAN GEDUNG ISLAMIC CENTER BATANG

Foto udara lokasi gedung Islamic Center Batang di Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (18/5). Pemkab Batang meresmikan pembangunan gedung Islamic Center tahap 1 yang berlokasi di pinggir jalan Pantura tersebut dengan total anggaran sebesar sekitar Rp60,8 miliar dengan harapan dapat bermanfaat untuk warga sebagai tempat manasik haji, tempat pertemuan dan sebagai lokasi wisata religi.

Wali Kota Tangerang Minta Warga Bijak Soal Aturan Lepas Masker

Lebih baik mencegah daripada terpapar, apabila ada gejala pilek atau batuk ya lebih baik tetap pakai masker. Tapi kalau merasa yakin sehat, silakan tidak pakai masker selama di tempat terbuka," ujar Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, menyikapi diperbolehkannya masyarakat lepas masker saat di luar ruangan.

TANGERANG (IM)- Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah meminta masyarakat dalam menyikapi aturan diperbolehkannya lepas masker saat di luar ruangan. Kendati aturan pelonggaran itu diberlakukan, masyarakat kalangan rentan serta masyarakat yang menggunakan transportasi publik diharapkan tetap menggunakan masker sebagai upaya antisipasi terpapar Covid-19.

"Lebih baik mencegah daripada terpapar, apabila ada gejala pilek atau batuk ya

lebih baik tetap pakai masker. Tapi kalau merasa yakin sehat, silakan tidak pakai masker selama di tempat terbuka," ujar Arief, Rabu (18/5).

Arief mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap masih adanya potensi penularan Covid-19. Sikap itu tetap diperlukan meski kasus Covid-19 di Kota Tangerang melandai berdasarkan data kasus harian. "Beberapa hari bahkan sempat tidak terjadi penambahan kasus, tetapi masih ada yang positif," tuturnya.

Lebih lanjut, Arief men-

gaku menyambut positif ihwal aturan terbaru pelonggaran penggunaan masker yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut. Aturan anyar itu dinilai membuktikan bahwa kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia, terutama kota-kota besar, termasuk kota penyangga seperti Kota Tangerang telah terkendali.

"Pastinya Presiden Joko Widodo juga mengambil kebijakan berdasarkan pada data, kondisi serta saran dari berbagai pihak," ungkapnya.

Lepas Masker

Menyusul kebijakan tanpa masker di ruang terbuka yang diumumkan Presiden Joko Widodo, warga Kota Tangerang menyambut positif. Kini warga mulai beraktifitas tanpa masker saat berada di luar ruangan.

Hari pertama kebijakan tersebut mulai diterapkan peserta peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di Stadion Benteng, Kota Tangerang, Rabu (18/5) siang. Sebagian besar dari ratusan

buruh yang hadir tidak lagi memakai masker saat mengikuti rangkaian acara, maupun saat berinteraksi dengan rekan di sekitarnya.

Slamet salah satu buruh mengaku menyambut positif kebijakan lepas masker, karena penanganan Covid-19 di Kota Tangerang telah dapat dikendalikan pemerintah, dengan tidak ada lonjakan kasus baru pasca arus mudik Lebaran.

Meski demikian, buruh mengaku saat bekerja di ruang tertutup masih memakai masker mengikuti instruksi perusahaan. Mereka berharap kebijakan awal berupa bebas masker, akan diikuti dengan pencabutan penerapan PPKM.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker di luar ruangan atau area terbuka. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (17/5), karena memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang saat ini terkendali.

"Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktifitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya secara daring, Selasa (17/5).

Namun, Presiden Jokowi mengatakan, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Jokowi juga meminta untuk masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan seperti lansia, memiliki riwayat penyakit komorbid untuk tetap menggunakan masker.

Selain itu, Pemerintah juga memberi kelonggaran untuk masyarakat yang sudah divaksinasi lengkap, tidak perlu melakukan tes Covid-19. "Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen," kata Jokowi. ● pp

Awasi Standar Keselamatan Kerja, DPRD Tangerang Bentuk Pokja

TANGERANG (IM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Banten, akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi dan menanganai khusus permasalahan standar keselamatan kerja industri di daerah itu.

"Sekarang masih kita bahas pembentukan pokja ini, dan nanti fungsinya akan mengawasi masalah BPJS, standar keselamatan kerja, dan lain sebagainya," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya di Tangerang, Rabu (18/5).

Ia mengatakan pembentukan pokja menyikapi adanya beberapa insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri di wilayah Kabupaten Tangerang.

Oleh karena itu, ia berniat untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga telah menyalahi aturan dan ketentuan keselamatan kerja sebelum menjadi perhatian

semua pihak. "Dalam pengawasan ini target kami ada 53 industri, nanti di dalam pokja tergabung anggota dari semua Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang," katanya.

Sejauh ini, kata Aditya, pihaknya telah menerima sejumlah aduan dengan total 12 kasus terkait pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan produksi industri tersebut.

"Dari 12 kasus terkait pelanggaran yang dilaporkan kepada kita, dan akhirnya ditarik menjadi 53 perusahaan yang akan kita lakukan pemeriksaan," ujarnya.

Ia berharap para pelaku usaha di bidang industri agar bisa memenuhi dan menaati aturan pemerintah terkait standar keselamatan dan kesehatan kerja serta perizinan yang ditetapkan. "Kami hanya ingin pekerja terjamin keselamatannya dalam bekerja. Makanya jika perusahaan yang sudah memenuhi aturan tidak akan dipermasalahkan," kata dia. ● pp

Anggota DPRD Pandeglang Desak Pemkab Segera Terbitkan SK PPPK Guru

PANDEGLANG (IM)- Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Erin Fabiana Ansori mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menerbitkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik formasi guru maupun non-guru yang telah lolos seleksi. Para PPPK tersebut sudah dinyatakan lulus sejak akhir tahun 2021. "SK dan SPMT harus secepatnya diberikan, jangan sampai menunggu bulan Oktober. Harus sekarang," kata Erin, Rabu (18/5).

SPMT merupakan dasar penggajian para PPPK. Jika mengacu pada aturan BKN, Erin mengatakan para PPPK sudah mendapatkan SK ketika sudah menerima NIP dan Pertek (Pertimbangan Teknis).

"Kalau liat dari BKN ini sudah terlambat. Kemudian juga ketika sudah di-SK-kan harus dipersiapkan untuk penggajian juga, jangan ditunda-tunda lagi,"

katanya. Dia juga meminta Pemkab segera menyiapkan anggaran untuk penggajian bagi PPPK yang sudah lolos seleksi.

"Kemudian meminta Pemkab untuk segera untuk mempersiapkan penggajian teman-teman yang lolos formasi PPPK. Minta Bupati untuk segera menyiapkan anggaran penggajian. Kalau misalkan belum dianggarkan nanti di Perubahan," tambahnya.

Sebelumnya PPPK formasi guru di Kabupaten Pandeglang belum mendapatkan SK pengangkatan dari Pemkab Pandeglang. Seharusnya SK pengangkatan sudah terbit sejak Februari.

"Februari itu terbit NIP dan Pertek dari BKN, lalu Pemda punya waktu paling lama 30 hari dari terbit NIP untuk meng-SK-kan. Berarti sekitar Maret pemda harus sudah memberikan SK kepada P3K," kata Abdul Aziz salah satu PPPK. ● pra

Dandim 0506/Tgr dan Forkopimda Hadiri Peringatan 'May Day' 2022

TANGERANG (IM)- Komandan Kodim 0506 Tangerang, Letkol Inf Ali Imran bersama Forkopimda Tangerang menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional "May Day" Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Aliansi Serikat Buruh Se-Kota Tangerang di Stadion Benteng Reborn, Jl TMP Taruna RT 01/02, Kel. Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Rabu (18/5).

Hadir di acara tersebut, Wali Kota Tangerang, H. Arief R Wismansyah, Gatot Wibowo SIP, Ketua DPRD Kota Tangerang, H Dr Ir Moch Rachmansyah MSi Asda 1 Kota Tangerang, Letkol Inf Ali Imran Dandim 0506/Tgr, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho SH SIK MSI Kapolres Metro Tangerang Kota, Ujang Hendra Gunawan SSos MM Kadisnaker Kota Tangerang, H. Ismail Ketua Apindo Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar Kadishub Kota Tangerang,

Ahmad Zuldin Syafei Camat Tangerang, Mayor Inf Suroyo Wadanramil 01/Tgr, Kompol Suroto Kapolsek Tangerang, Yan Dwiyanto Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimone, Hardiansyah mewakili BPJS Ketenagakerjaan, Muhamad Irfan mewakili Kajari Kota Tangerang, dan Para Ketua Serikat Buruh serta Perwakilan Pekerja Se Kota Tangerang.

Peringatan tersebut, diisi dengan kegiatan sosial di antaranya donor darah, vaksinasi dan servis motor gratis.

Dandim 0506 Tangerang, Letkol Inf Ali Imran mengatakan, kegiatan ini sangat positif di mana diisi dengan gerakan sosial dengan melaksanakan donor darah, turut mensukseskan gerakan vaksinasi dan juga melakukan servis motor gratis.

Dengan adanya kegiatan sosial dalam memperingati Hari Buruh Internasional, tentunya banyak hal positif yang

diambil, salah satunya kepedulian terhadap sesama dengan mendonorkan darahnya untuk mengkas stok ketersediaan darah di PMI.

Selain itu, Dandim menyampaikan apresiasinya kepada elemen buruh yang telah berpartisipasi langsung dan aktif membantu Pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi.

Dandim menjelaskan, kegiatan yang positif ini, menunjukkan kepada masyarakat Indonesia maupun dunia, bahwa Kota Tangerang tetap kondusif untuk investasi.

"Dengan menjaga kondusifitas yang aman dan nyaman, Insya Allah, para investor akan menanamkan modalnya di sini sehingga membuka peluang lapangan kerja. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik," jelas Dandim di sela-sela acara. ● joh



Dandim 0506/Tgr bersama Forkopimda saat menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional "May Day" 2022.

ANTISIPASI HEPATITIS AKUT

Pemkot Tangsel Tunjuk RSU Tangsel Jadi Fasilitas Kesehatan Rujukan

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Kesehatan menunjuk Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangsel menjadi fasilitas pelayanan rujukan dalam penanganan hepatitis akut. Nantinya, RSU Kota Tangsel akan menyiapkan delapan ruang inap untuk menjalani isolasi penanganan hepatitis akut di dua lantai.

"Baik tenaga medis dan protokol penanganan pasien juga sudah disiapkan. Nantinya ada dua lantai di gedung yang berbeda dengan kapasitas delapan ruang rawat inap di lantai khusus perawatan anak," kata Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Media RSU Kota

Tangsel, Taufik Dipa Sempana, Rabu (18/5).

Taufik mengatakan, pihaknya akan menerapkan pola penanganan hepatitis akut seperti hepatitis pada umumnya.

"Dalam penanganan bagi pasien yang bergejala, RSU Tangsel akan menempatkan pasien terlebih dahulu di ruang isolasi untuk mendapatkan pertolongan medis pertama," ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini belum ada ditemukan kasus penderita hepatitis akut di wilayah Kota Tangsel. Namun, pihak pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi kasus hepatitis akut tersebut jika terjadi di Tangsel. ● pp



PELAKSANAAN UAS TINGKAT SD TAHUN 2022

Sejumlah murid kelas 6 SD Negeri 02 mengerjakan soal ujian akhir sekolah (UAS) di Kota Serang, Banten, Rabu (18/5). UAS tingkat SD di Kota Serang diikuti 12.415 peserta yang dijadwalkan akan berlangsung hingga Sabtu (21/5) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dishub Desak Pol PP Tertibkan Parkir RSU Tangsel yang dikuasai Ormas

TANGSEL (IM)-Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mengaku bahwa pihaknya sudah berulang kali memberi teguran terhadap pengelolaan parkir di area Rumah Sakit Umum (RSU), Jalan Padjajaran, Pamulang.

Namun semua teguran tak digubris massa Ormas yang mengelola parkir di sana. Langkah terakhir, Dishub melayangkan surat resmi kepada Satpol PP guna membantu penertiban pengelolaan parkir di lahan milik pemerintah itu. "Kami sudah tegur beberapa kali, teguran terakhir Januari (2022) kemarin. Akhirnya karena nggak ditanggapi, kami kirim surat resmi ke Satpol PP?" ungkap Kepala Seksi Tata Teknis Perparkiran Dishub Tangsel, Nanda A Iqbal, Rabu (18/5).

Nanda sendiri tak mengetahui mengapa sejak surat dikirim ke Satpol PP hingga saat ini belum juga ada penertiban parkir di RSU Tangsel. Yang pasti, kata dia, kewenangan Dishub sudah dijalankan sebagaimana mestinya. "Kami kurang tahu soal itu (penertiban), karena surat sudah kami kirim ke sana," jelasnya.

Menurut Nanda, setiap pengelolaan parkir harus terbit memiliki izin, apalagi di lahan milik pemerintah seperti RSU. Sehingga pendapatan parkir di area tersebut bisa menjadi pemasukan bagi kas daerah. "Kami lihat dari sisi penyelenggaraan yang tidak berizin, makanya teguran kami juga terhadap penyelenggaraan parkir yang tidak berizin yang ada di RSU. Karena dia kan ada pungutan juga kan, pokoknya setiap ada pungutan pada prinsipnya dia harus ada izin," katanya.

Dilanjutkan Nanda, beberapa kali perwakilan Ormas mendatangnya guna menanyakan prosedur pengelolaan parkir di RSU Tangsel. Dia pun memersialkan untuk menepuh ketentuan yang sudah diatur. Lebih jauh, dia membeberkan bahwa banyaknya penyelenggaraan parkir yang tidak sesuai aturan di Tangsel disebabkan pula oleh kurang luasnya aturan yang ada, seperti penekanan atas sanksi-sanksi bagi pelanggar.

"Setelah saya inventarisir masih banyak, mohon maaf sekali, banyak yang belum terakomodir secara aturan, yang belum menggegit. Contoh saja misalkan kalau di DKI, parkir di trotoar, parkir ini, derek, angkut, itu belum ada," papar dia.

Kini pihaknya masih melakukan kajian naskah akademis terkait payung hukum aturan parkir secara lengkap. Dia berharap tahun ini naskah akademis selesai dan bisa dimasukkan ke dalam Raperda. Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Oki Rudianto belum mau menanggapi perihal surat permintaan penindakan pengelolaan di lingkungan RSU Pamulang.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan parkir di RSU Tangsel bertahun-tahun tak jelas pengelolaannya. Tiap kendaraan pengunjung atau pasien yang datang langsung disetop dan dipungut tarif oleh sekelompok oknum Ormas. Pengunjung yang membawa kendaraan mobil diharuskan membayar parkir Rp5 ribu, sedang sepeda motor dikenakan tarif Rp5 ribu. Pungutan itu tertera dalam selebaran karasis yang dikeluarkan anggota Ormas di pintu masuk RSU. ● pp